

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 2



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media : Radar Sampit Halaman : 11

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Kalteng Tolak LPJ APBD Tahun 2021 Fraksi Partai Demokrat DPRD

PALANGKA RAYA-Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng, H Sriosako secara tegas menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Penolakan tersebut Sriosako lakukan berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya seperti, tidak dimuatnya APBD Perubahan, tidak ada rincian detail

hibah anggaran Covid-19, tidak adanya rincian hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, tidak adanya kejelasan serta kepastian rencana pembangunan Barik Kalteng dan Rumah Sakit.

“Sesuai dengan pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat saat pelaksanaan Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak menerima Raperda terkait LPJ

APBD tahun 2021. Artinya kami tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Jumat (29/7).

Ketua Komisi IV ini juga menyampaikan dengan tegas, saat pelaksanaan Rapat Paripurna ke IV, masa persidangan II tahun sidang 2022, Fraksi Partai Demokrat tidak akan berhadir dalam proses tersebut. Hal ini karena konsekuensi yang diterima sekaligus konsistensi Fraksi

Demokrat atas penolakan LPJ APBD tahun 2021 tersebut.

“Sebagai konsekuensi yang diterima dan kami konsisten dengan sikap kami, dengan itu Fraksi Partai Demokrat tidak bisa mengikuti Rapat Paripurna IV masa sidang II tahun 2022 tentang LPJ APBD tahun 2021, karena tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Sriosako. (pra/ans)